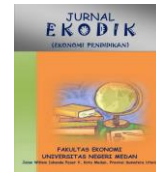


JURNAL EKODIK, 13 (2) (2025):

Jurnal Ekonomi Pendidikan

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/qe/index>



PENGARUH PENGANGGURAN DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN MELALUI IPM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING: STUDI PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA

Sena samosir¹, Kezia Br Aritonang², Mirna Siregar³, Ilman Azhari Siregar⁴, Yoga Erguna Sitepu⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Email: Senakesia10@gmail.com, keziaaritonang0907@gmail.com,
mirnasiregar83@gmail.com, ilmanazhari78@gmail.com, yogaerguna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dampak pengangguran dan upah minimum regional (UMR) terhadap kemiskinan di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel perantara. Menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2018 hingga 2022, studi ini mengungkapkan hubungan yang rumit antara variabel-variabel tersebut. Temuan menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya UMR secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kemiskinan, dengan IPM berperan sebagai mediator yang memperkuat efek tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengangguran, UMR, Kemiskinan, IPM

Abstract

This study examines the effects of poverty and regional minimum wages (UMR) on poverty levels in Indonesia, using the Human Development Index (HDI) as an intermediary variable. By analyzing panel data from 34 provinces during the period from 2018 to 2022, the research uncovers complex interrelationships among these variables. The results indicate that high poverty rates and low minimum wages significantly contribute to the escalation of poverty, with HDI serving as a mediator that enhances this impact. The study emphasizes the necessity for more inclusive and responsive policies that address economic conditions to effectively combat poverty and enhance community welfare. It is anticipated that the findings will guide policymakers in developing more effective and sustainable strategies for poverty alleviation.

Keywords: Unemployment, UMR, Poverty, HDI

How to Cite: Aritonang, k. B., Siregar, M., Siregar, I. A., Sitepu, Y. E. (2025). Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Melalui IPM Sebagai Variabel Intervening: Studi Pda 34 Provinsi Di Indonesia. *JURNAL EKODIK*, Vol (13), No.2 : Halaman 1-8.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia adalah persoalan yang rumit dan memiliki banyak dimensi, mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, angka kemiskinan tetap menjadi perhatian. BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan bahwa di beberapa kawasan, terutama daerah terpencil dan kurang berkembang, tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan sering kali tidak menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Kuncoro (2006) menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh sekelompok kecil orang yang berada di puncak piramida ekonomi.

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah pengangguran. Ginanjar (2016) dalam bukunya *Ekonomi Mikro dan Makro* menjelaskan bahwa pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada. Situasi ini menciptakan kondisi di mana banyak individu, meskipun memiliki keterampilan, tetap tidak mendapatkan pekerjaan.

Dampak pengangguran sangat luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika individu tidak bekerja, pendapatan mereka menurun, yang berpengaruh langsung terhadap daya beli. Sukirno (2019) dalam *Ekonomi Pembangunan* menyatakan bahwa pengangguran tidak hanya menurunkan pendapatan individu, tetapi juga berdampak pada konsumsi secara keseluruhan. Jika banyak orang tidak memiliki pekerjaan, konsumsi barang dan jasa akan berkurang, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Fenomena ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Todaro dan Smith (2011) dalam *Economic Development* menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat

mengarah pada kemiskinan yang lebih dalam, karena individu yang menganggur tidak hanya kehilangan pendapatan tetapi juga akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang menurunkan kualitas hidup dan peluang untuk memperbaiki status ekonomi di masa depan. Selain itu, pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kuncoro (2004) dalam *Pembangunan Ekonomi* menyebutkan bahwa pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan potensi konflik, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dalam upaya merumuskan kebijakan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pengangguran berkontribusi terhadap kemiskinan serta mencari solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Upah Minimum Regional (UMR) memiliki peran penting dalam menentukan daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Ananda (2012) dalam *Kebijakan Upah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pekerja* menegaskan bahwa UMR seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Namun, kenyataannya, UMR yang rendah sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, yang berujung pada kesengsaraan ekonomi bagi pekerja. Lebih jauh, rendahnya UMR tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan di tingkat masyarakat. Kuncoro (2006) mengungkapkan bahwa upah yang tidak memadai dapat menyebabkan stagnasi dalam konsumsi domestik. Ketika daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi akan terhambat, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Penting untuk memahami hubungan antara UMR dan kemiskinan dalam konteks kebijakan publik. Sukirno (2019) berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan UMR harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, biaya hidup, dan kebutuhan dasar. Tanpa penyesuaian yang tepat, kebijakan UMR yang tidak responsif terhadap kondisi ekonomi dapat

memperburuk ketidakadilan sosial dan menciptakan ketimpangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengaruh UMR terhadap kemiskinan dan mencari cara untuk mengoptimalkan kebijakan upah. Dengan memahami interaksi antara UMR dan kondisi ekonomi, diharapkan dapat diusulkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Melalui pendekatan ini, upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan inklusif dapat tercapai.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai variabel intervening yang relevan dalam konteks kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Nugroho dan Clarissa (2019) menjelaskan bahwa IPM tidak hanya mengukur aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan dan kesehatan—dua elemen penting yang saling berinteraksi dalam pengentasan kemiskinan. Keduanya menjadi dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang berdampak positif pada produktivitas dan pendapatan individu. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi sering kali berkaitan dengan peningkatan pendapatan, yang krusial dalam konteks kemiskinan. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan yang baik memastikan individu dapat bekerja secara produktif tanpa terhambat oleh masalah kesehatan. Suharto (2013) menekankan bahwa kesehatan yang baik memungkinkan individu berkontribusi lebih efektif dalam ekonomi, yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun terdapat hubungan yang jelas antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan, serta peran IPM sebagai penghubung, penelitian sebelumnya sering kali hanya fokus pada satu aspek saja. Kuncoro (2006) mencatat bahwa banyak studi yang mengabaikan interaksi dinamis antara ketiga variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih holistik yang mempertimbangkan hubungan antara pengangguran, UMR, dan IPM. Penelitian

ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana IPM berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan, serta untuk memberikan wawasan tentang kebijakan yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006) menerangkan bahwa penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu Teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) adanya keterbelakangan dan tertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercerminkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB perkapita).

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan begitu seterusnya. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial. Sehingga kelompok miskin adalah dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena rendahnya penghasilan (Suharto, 2013).

Pengangguran

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (*income poverty rate*) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa

Sena Samosir, **Pengaruh Pengangguran Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada 34 Provinsi Di Indonesia**

konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Upah Minimum Regional

Upah Regional Regional merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu (Prasetyo, 2010). Sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam PP No. 8/1981 upah ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, walaupun yang dimiliki oleh setiap daerah sekarang hanya upah minimum regional.

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER01/MEN/1999“tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Akan tetapi sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/200) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK kab/kota) (Zulkifli, 2016).

Upah minimum yang tinggi akan menunjukkan penghasilan ekspektasi (expected return) pekerja semakin tinggi pula, sehingga mendorong pekerja agar berpindah dari pasar kerja berpendidikan rendah ke pasar kerja berpendidikan tinggi. Namun hal ini tidak berpengaruh signifikan, dikarenakan tidak semua perusahaan dalam suatu provinsi benar-benar menerapkan kebijakan upah minimum. Sedangkan dari sisi lain, tingkat upah yang tinggi akan mampu mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja berpendidikan tinggi

sehingga dampaknya pada peningkatan upah minimum tersebut pada sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah pengangguran (Ananda, 2012).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah metrik yang menilai prestasi pembangunan manusia dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama kualitas hidup yang berpotensi memengaruhi tingkat produktivitas individu (Saputra, 2011). IPM mengevaluasi tiga dimensi utama yang meliputi umur yang panjang dan sehat, mendorong pendidikan dan pengetahuan, dan mempromosikan standar hidup yang memuaskan (Nugroho & Clarissa, 2019).

Pembangunan manusia menjadi sasaran utama dalam pembangunan. Manusia sebagai titik sentral pembangunan tidak lagi menjadi objek pembangunan namun menjadi subjek dalam pembangunan itu sendiri. Komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

- a. Derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (life expectancy rate), parameter kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, mengukur keadaan sehat dan berumur panjang.
- b. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf rata-rata lamanya sekolah, parameter pendidikan dengan angka melek huruf dan lamanya sekolah, mengukur manusia yang cerdas, kreatif, terampil, dan bertaqwa.
- c. Pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (purchasing power parity), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemampuan manusia dalam menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini pemerintah di setiap negara perlu meningkatkan kualitas sumber

Sena Samosir, **Pengaruh Pengangguran Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada 34 Provinsi Di Indonesia**

daya manusia baik dari segi aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), maupun aspek kesejahteraan (ekonomi) (Suharto, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh pengangguran dan UMR terhadap kemiskinan melalui IPM di Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel *intervening*, dan dua variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan (Y), variabel *intervening* yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Z), dan variabel independen yang digunakan yaitu pengangguran (X1) dan Upah Minimum Regional (X2).

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan model data panel yang berfokus pada tingkat kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup data Tingkat Kemiskinan (persentase penduduk miskin), data IPM (indeks), data Pengangguran (tingkat pengangguran terbuka), dan data UMR (upah minimum dalam rupiah).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan studi dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan mengumpulkan informasi melalui catatan, studi literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lain yang masih relevan. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk dianalisis oleh peneliti yang membutuhkan. Data ini biasanya tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan, tetapi digunakan kembali dari sumber-sumber lain yang relevan (Napitupulu et al., 2021). Data yang sudah diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis sehingga akan mengetahui hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Uji Hipotesis Persamaan Struktural 1 (IPM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.79483	0.585043	107.3337	0.0000
TPT	-0.065931	0.058916	-1.119064	0.2651
UMR	3.505853	0.236944	14.79613	0.0000
Adj. R-squared	0.982795			
F-statistic	276.8135			
Prob.	0.00000			

$$IPM_{it} = 62.79483 - 0.065931TPT + 3.505853UMR + e$$

- Variabel pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar -1.119064 dengan nilai prob. sebesar 0.2651 (>0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel IPM. (H0)
Nilai Koefisien variabel pengangguran sebesar -0.065931 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel IPM, dimana bertambahnya angka pengangguran sebesar 1% akan berakibat pada penurunan IPM sebesar 6.59 indeks.
- Variabel UMR memiliki nilai t-hitung sebesar 14.79613 dengan nilai prob. sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. (H1)
Nilai Koefisien variabel UMR sebesar 3.505853 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh positif terhadap variabel IPM, dimana bertambahnya angka UMR sebesar 1jt rupiah akan berakibat pada peningkatan IPM sebesar 350.58 indeks.
- Nilai F-statistic sebesar 276.8135 dengan nilai prob. sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran dan UMR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM.
- Berdasarkan nilai Adj. E-square sebesar 0.982795, dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran dan UMR secara

Sena Samosir, **Pengaruh Pengangguran Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada 34 Provinsi Di Indonesia**

bersama-sama memengaruhi IPM sebesar 98,27% dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Persamaan Struktural 2 (Kemiskinan)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.856984	0.5502407	13.64826	0.0000
TPT	0.018178	0.005450	3.335153	0.0011
UMR	0.102650	0.035409	2.899007	0.0044
IPM	-0.016689	0.007955	-2.098078	0.0378
Adj. R-squared	0.997942			
F-statistic	2276.956			
Prob.	0.0000			

$$K_{it} = 6.856984 + 0.018178TPT + 0.102650UMR - 0.016689IPM + e$$

- Variabel pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar 3.335153 dengan nilai prob. sebesar 0.0011 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. (H1)
Nilai Koefisien variabel pengangguran sebesar 0.018178 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, dimana bertambahnya angka pengangguran sebesar 1% akan berakibat pada peningkatan kemiskinan sebesar 1,81%.
- Variabel UMR memiliki nilai t-hitung sebesar 2.899007 dengan nilai prob. sebesar 0.0044 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. (H1)
Nilai Koefisien variabel UMR sebesar 0.102650 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, dimana bertambahnya angka UMR sebesar 1jt rupiah akan berakibat pada peningkatan kemiskinan sebesar 10.26%.
- Variabel IPM memiliki nilai t-hitung sebesar 2.098078 dengan nilai prob. sebesar 0.0378(<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. (H1)
Nilai Koefisien variabel IPM sebesar - 0.016689 sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan, dimana bertambahnya indeks IPM sebesar 1 indeks akan berakibat pada penurunan kemiskinan sebesar 1,66%.

Uji Sobel

- Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan melalui IPM

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a -0.065931	Sobel test: 0.98737877	0.00111439	0.32345699
b -0.016689	Aroian test: 0.91016056	0.00120893	0.36273784
s _a 0.058916	Goodman test: 1.08830783	0.00101104	0.27645924
s _b 0.007955	Reset all	Calculate	

Variabel Pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar 0.98737877 dengan nilai prob. sebesar 0.3234 (<1.96) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan melalui IPM. (H1)

- Pengaruh UMR terhadap Kemiskinan melalui IPM

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a 3.505853	Sobel test: -2.07715013	0.02816801	0.03778771
b -0.016689	Aroian test: -2.07251522	0.028231	0.03821742
s _a 0.236944	Goodman test: -2.08181628	0.02810487	0.03735925
s _b 0.007955	Reset all	Calculate	

Variabel UMR memiliki nilai t-hitung sebesar 2.0771 dengan nilai prob. sebesar 0.0377 (<1.96) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan melalui IPM. (H1)

Pembahasan

- Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli masyarakat, yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Individu yang menganggur tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga akses ke layanan dasar, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan.
- UMR juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. UMR yang rendah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja, yang mengakibatkan banyak keluarga jatuh ke dalam kemiskinan. Kenaikan UMR diharapkan dapat meningkatkan daya beli, namun jika tidak disertai dengan peningkatan kesempatan

Sena Samosir, **Pengaruh Pengangguran Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada 34 Provinsi Di Indonesia**

- kerja, dampaknya terhadap kemiskinan bisa terbatas.
- IPM berfungsi sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan yang baik, yang tercermin dalam IPM, berfungsi sebagai penopang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko kemiskinan.
 - Pengujian simultan menunjukkan bahwa pengangguran dan UMR secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui IPM. Ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kemiskinan, di mana kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran dan peningkatan UMR harus dijalankan bersamaan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.
 - Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi pasar tenaga kerja dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan jumlah lapangan kerja, pengaturan UMR yang adil, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah langkah-langkah kunci untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini mengenai pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 34 provinsi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, semakin banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ini menegaskan pentingnya kebijakan yang efektif untuk mengurangi pengangguran sebagai langkah dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu, UMR memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upah minimum yang layak dapat meningkatkan daya beli, meskipun masih terdapat banyak daerah di Indonesia dengan UMR di bawah kebutuhan hidup minimum, yang memperburuk situasi kemiskinan.

IPM juga berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan. Peningkatan IPM—melalui akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan—dapat mengurangi dampak negatif dari pengangguran dan UMR yang rendah. Oleh karena itu, meningkatkan IPM harus menjadi bagian penting dari kebijakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan terintegrasi dalam merumuskan kebijakan publik. Fokus hanya pada pengurangan pengangguran atau peningkatan UMR tidaklah cukup; diperlukan sinergi antara perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan akses kesehatan, dan penetapan UMR yang responsif untuk secara efektif mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Bandan Penerbit Undip.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometric*. McGraw-Hill.
- Karisma, A., & Soejoto, A. (2010). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–15.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga.

Sena Samosir, **Pengaruh Pengangguran Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada 34 Provinsi Di Indonesia**

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UUP STIM YKPN. Kencana.
- Kusbianto, H., & Silalahi, D. H. (2020). *Hukum Perburuhan*. Enam Media.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumbantobing, C. E. R. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS* (1st ed.). Madenatera.
- Nugroho, A., & Clarissa, A. (2019). Indeks pembangunan manusia 2019. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Putong, I. (2013). *Economics pengantar Mikro Dan Makro*. Mitra Wacana Media.
- Rianto, N. (2010). *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*. Alfabeta.
- Sajogyo. (1996). *Memahami dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saputra, W. A. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Alfabeta.
<https://doi.org/978-602-8361-26-2>
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Todaro, & Smith. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Pearson.
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada.